

IMPLEMNTASI KOMUNIKASI PEMERINTAH MELALUI E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KABUPATEN SAMPANG

Diana Ayu Ekawati¹, Mohammad Thamrin²

dianaayuekawatii@gmail.com¹, mohammadthamrin61@gmail.com²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah untuk menerapkan E-government dalam meningkatkan pelayanan publik. E-government telah bertransformasi menjadi konsep Smart city. Namun, belum semua kota siap untuk menjalankannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan E-government sebagai basis implementasi program Smart city di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan observasi dan wawancara terhadap 5 stakeholder Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini, digunakan teori S-O-R untuk memahami realitas sosial yang mendasari tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-government sebagai basis implementasi program Smart city di Kabupaten Sampang sudah berjalan dengan adanya berbagai aplikasi dan layanan yang telah ada. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kekurangan sumber daya manusia dan pemahaman yang belum memadai terkait sistem teknologi informasi dan komunikasi di organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan kelancaran penerapan E-government dan optimalisasi pelayanan publik secara elektronik.

Kata Kunci: Impelementasi, E-government, Smart city, Teori S-O-R.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has encouraged the government to implement E-government in improving public services. E-government has transformed into a Smart city concept. However, not all cities are ready to run it. Therefore, this study aims to identify the implementation of E-government as the basis for implementing Smart city programs in Sampang Regency. This study used a descriptive qualitative method involving observation and interviews with 5 stakeholders of Sampang Regency. In this study, S-O-R theory was used to understand the social reality underlying actions. The results showed that the implementation of E-government as the basis for implementing the Smart city program in Sampang Regency has been running with various existing applications and services. However, the results also show that there is a lack of human resources and inadequate understanding related to information technology systems.

Keywords : Implementation, E-government, Smart city, S-O-R Theory.

PENDAHULUAN

Pada era revolusi industri 5.0 ini, instansi pemerintah memiliki tanggung jawab utama terhadap masyarakat untuk memastikan bahwa layanan publik diprioritaskan dalam hal efektivitas dan efisiensi guna mencapai pelayanan yang optimal. Permintaan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik semakin meningkat, terutama karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kompleks. Pemerintah terus berusaha meningkatkan pelayanan dengan menciptakan berbagai layanan digital. Beberapa negara maju telah mengadopsi teknologi terbaru dan menerapkan E-government sebagai mekanisme baru dalam birokrasi pemerintahan, yang memberikan peluang untuk

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik melalui platform digital.

Pelaksanaan konsep E- government dimaksudkan untuk memastikan hubungan yang efektif dan efisien antara pemerintah dan masyarakat. Konsep E-government menandakan bahwa peran media konvensional telah digantikan oleh teknologi sebagai alat utama, (Ramdani, 2018). Kehadiran Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan E-government di Indonesia. Selanjutnya, aspek hukum terkait pengembangan E-government terus diperbarui melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Nadila, 2021).

Dalam situasi ini, peran komunikasi pemerintah memiliki signifikansi yang sangat besar. Komunikasi pemerintah tidak hanya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan, keterlibatan, dan partisipasi publik dalam pembangunan Smart city. Kesuksesan implementasi program pemerintah bergantung pada keterlibatan pemerintah kota, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari kelompok-kelompok dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dengan asumsi tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk memahami sejauh mana implementasi dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang dalam mencapai tata kelola

yang cerdas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana komunikasi pemerintah melalui E-government di Kabupaten Sampang berkontribusi dalam mewujudkan konsep Smart city.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sampang, yakni pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang sebagai fokus utama. Pemilihan lokasi penelitian ini dilatar belakangi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam mewujudkan Smart city melalui E- government, memiliki peran sentral. Mereka bertanggung jawab atas infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, dan keamanan informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Sampang juga mengorganisir pelatihan masyarakat, mengelola dan menganalisis data, serta berkolaborasi dengan departemen lain dalam pemerintah daerah. Populasi penelitian dipilih dengan mempertimbangkan peran implementasi E-government di Kabupaten Sampang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang diprioritaskan karena tanggung jawab mereka dalam implementasi E-government di daerah tersebut. Sementara itu, Dinas

Pendidikan Kabupaten Sampang, tokoh ulama, tokoh pemuda, dan anggota DPRD Kabupaten Sampang dipilih sebagai pengguna yang secara langsung merasakan dampak dari penerapan E- government tersebut.

Penelitian mengenai implementasi komunikasi pemerintah melalui E-government di Kabupaten Sampang memiliki relevansi yang sangat penting dalam mengatasi permintaan masyarakat akan layanan publik yang lebih baik di era revolusi industri 5.0. Penelitian ini menjadi elemen kunci untuk memahami perkembangan E-government sebagai instrumen utama dalam administrasi pemerintahan serta dampaknya terhadap efisiensi dan keterbukaan layanan publik. Selain itu, penekanan pada peran komunikasi pemerintah dalam memupuk kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Smart city sangatlah penting. Dengan fokus pada Kabupaten Sampang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi yang diterapkan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan keterlibatan

masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pemahaman konsep Smart city dan implementasinya dalam konteks lokal, yang dapat menghasilkan peningkatan dalam tata kelola yang cerdas dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis datanya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah upaya untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan ini mengandalkan deskripsi verbal dan linguistik untuk menggambarkan konteks yang spesifik dari fenomena tersebut, dengan menggunakan metode ilmiah yang berbeda. (Moleong, 2007:6). Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan bagaimana memecahkan masalah saat ini berdasarkan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan fenomenologis dengan menggunakan model interpretatif. Paradigma interpretatif adalah pendekatan yang menganggap peneliti dan subjek sebagai entitas yang perlu dipelajari secara mendalam untuk memahami fenomena dan peristiwa dalam kehidupan manusia sehari-hari (Djasuli, 2017). Pendekatan fenomenologis merupakan konsep atau rancangan penelitian yang berasal dari bidang filsafat dan psikologi, di mana peneliti menggambarkan pengalaman hidup manusia terkait dengan fenomena tertentu. Studi fenomenologi sangat terkait dengan interpretasi pengalaman individu dengan upaya memahami perspektif partisipan. Hal yang serupa berlaku dalam studi fenomena E-government sebagai sistem manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan layanan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan penggunaan E-government di kalangan pegawai pemerintah Kabupaten Sampang. Secara lebih spesifik, penelitian deskriptif kualitatif ini ditujukan untuk mengekstrak informasi dari

pengalaman yang terjadi. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi E-government yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep Smart city.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kondisi E-government di Kabupaten Sampang, pemerintah telah berhasil mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan sangat baik, yang tercermin dari pencapaian predikat Sangat Baik dengan indeks 3,57. Prestasi ini tidak hanya menjadi pendorong positif bagi Kabupaten Sampang, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pelopor dalam penerapan E-government di wilayah tersebut. Menariknya, capaian tersebut juga menempatkan Kabupaten Sampang di posisi terdepan jika dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya di Pulau Madura.

Pencapaian ini tercatat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2023. Surat Keputusan tersebut diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2024 dan mendapat tanda tangan langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.

Yang menarik, indeks SPBE Kabupaten Sampang mengalami peningkatan yang

signifikan dari tahun sebelumnya, mencapai 2,55. Hal ini menandakan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam penerapan E- government di wilayah tersebut. Peningkatan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari dukungan kuat dan peran yang aktif dari berbagai pihak, terutama Sekretaris Daerah yang memimpin Tim Koordinasi SPBE. Kolaborasi yang baik antar perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap berbagai indikator SPBE juga memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kinerja sistem ini (Umam, 2024).

Dengan demikian, pencapaian ini tidak hanya merupakan prestasi semata, tetapi juga mencerminkan komitmen yang teguh dari pemerintah Kabupaten Sampang untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Teori keterlibatan publik dalam komunikasi pemerintah untuk mencapai Smart city melalui E-government melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik melalui platform digital. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir, E-government memfasilitasi pemerintah untuk menjadi lebih terbuka, jujur, dan tanggap terhadap kebutuhan warga. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, Smart city dapat diwujudkan dengan efisiensi yang lebih tinggi dalam penyediaan layanan publik, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup bagi penduduk perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menggunakan E-government untuk mendukung pembangunan Smart city dengan menerapkan Teori Keterlibatan Publik. Secara keseluruhan, hipotesis ini mengatakan bahwa kemungkinan munculnya lingkungan perkotaan yang cerdas berkorelasi dengan seberapa efektif pemerintah melibatkan publik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan E-government. Penelitian ini menganalisis bagaimana teori keterlibatan publik diterapkan di Kabupaten Sampang dan bagaimana hal itu berdampak pada kemajuan pembangunan Smart city melalui E-government.

Hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah Kabupaten Sampang dapat melibatkan masyarakat secara efektif dalam pembangunan Smart city dengan menggunakan E- government. Teori keterlibatan publik menekankan bahwa aspirasi, kebutuhan, dan kontribusi masyarakat harus dipertimbangkan saat membuat keputusan tentang masalah yang berkaitan dengan pembangunan kota. Dalam konteks E-government, keterlibatan publik dapat tercermin dalam berbagai cara, seperti penyediaan informasi yang transparan, mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dan penggunaan platform online yang memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Bahri, dkk 2020).

“Untuk itu kami sudah banyak melibatkan stakeholder yang berurusan dengan program- program yang akan kita laksanakan untuk E-government pada saat mewujudkan masterplance city pada program-program E-government kita untuk mewujudkan Smart city. Jadi semua stakeholder kita libatkan”. (AH, 54)

AH menyatakan bahwa proses pembangunan E-government menuju Smart city membutuhkan partisipasi semua pihak terkait atau stakeholder. Beliau menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan pelaksanaan program E-government. Dalam konteks pembangunan Smart city, pemerintah Kabupaten Sampang berusaha memastikan bahwa semua perspektif dan kebutuhan masyarakat dipertimbangkan dengan serius saat merumuskan masterplan untuk pembangunan Smart city. Dalam upaya ini, partisipasi aktif dari stakeholder sangat penting untuk memperkuat legitimasi dan keberhasilan inisiatif E- government serta memastikan fokus pada kebutuhan masyarakat.

Partisipasi stakeholder dalam pembangunan Smart city melalui E- government mencerminkan prinsip keterlibatan publik. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait, pemerintah Kabupaten Sampang dapat memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini penting untuk memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah serta memastikan bahwa pembangunan Smart city berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Smart city, peran stakeholder sangat penting dalam menyediakan masukan dan umpan balik yang berharga. Melalui partisipasi aktif mereka, stakeholder dapat memberikan perspektif yang beragam, mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan memberikan saran untuk peningkatan layanan E- government. Dengan demikian, melibatkan stakeholder dalam proses pembangunan Smart city melalui E- government dapat memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan relevan, efektif, dan sesuai dengan harapan masyarakat (Bahri, dkk 2020).

Keterlibatan stakeholder dalam implementasi E-government juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan program. Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Sampang dapat membangun dukungan yang kuat untuk program E- government dan memastikan kelangsungan serta peningkatan layanan yang diberikan. Selain itu, melibatkan stakeholder juga dapat memperkuat pemahaman tentang kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam pembangunan Smart city.

Dalam upaya melibatkan stakeholder secara efektif, pemerintah Kabupaten Sampang perlu menciptakan mekanisme komunikasi yang terbuka dan inklusif. Forum diskusi, pertemuan publik, dan platform online dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan stakeholder. Melalui dialog yang terbuka, pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait, yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan implementasi program E-government. Dengan demikian, melibatkan stakeholder dalam pembangunan Smart city melalui E-government merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan Smart city yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sampang berkomitmen untuk menjadikan proses pembangunan Smart city sebagai upaya kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan gagasan keterlibatan publik dalam teori keterlibatan publik yang diuraikan sebelumnya. Akibatnya, partisipasi stakeholder diharapkan dapat memperkuat legitimasi inisiatif E- government dan memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadi fokus utama dalam upaya menuju Smart city.

Penerapan E-government untuk mencapai konsep Smart city telah menjadi fokus utama pemerintah, termasuk Kabupaten Sampang. Faktor- faktor seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan krusial dalam membentuk kerangka kerja yang inklusif. Namun, untuk keberhasilan transformasi dan optimalisasi E-government, perhatian terhadap teori umpan balik oleh Harold Lasswell penting. Teori ini menekankan pentingnya pemerintah mendapatkan wawasan dari masyarakat untuk mengembangkan strategi E-government secara efektif. Dalam konteks mewujudkan Smart city yang inklusif dan inovatif di Kabupaten Sampang, teori umpan balik menjadi semakin penting.

Upaya pemerintah dalam menerapkan E-government menuju Smart city sangat bergantung pada tanggapan masyarakat. Dengan memanfaatkan teori umpan balik, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat serta mengevaluasi efektivitas layanan E- government. Integrasi teori ini dalam strategi E-government Kabupaten Sampang memastikan komunikasi yang lancar antara pemerintah dan

masyarakat. Melalui umpan balik yang diterima, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan, termasuk peningkatan literasi digital, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menyesuaikan layanan dengan nilai dan budaya lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan E-government adalah kunci untuk mencapai visi Smart city di Kabupaten Sampang, seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian terhadap pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Dalam sesi penggalian data yang telah dilaksanakan, peneliti kemudian menggali perspektif yang diaktualisasikan oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sampang. Pada sesi wawancara yang telah dilaksanakan, salah satu informan sebagai berikut:

“Kita banyak melakukan FGD dengan stakeholder, dan banyak sekali feedback salah satunya program sekolah sampah yang program dari DPRD dengan BASNAS. Itu artinya umpan balik dari masyarakat itu sudah kelihatan”. (AH, 54) Tanggapan dari AH menekankan betapa pentingnya umpan balik masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan program pemerintah. Beliau mengatakan bahwa mereka telah melakukan banyak Focus Group Discussions (FGD) dengan para pemangku kepentingan dan mendapat banyak umpan balik, salah satunya tentang program sekolah sampah yang dirancang oleh DPRD dan BASNAS. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif mendengarkan dan menanggapi pendapat masyarakat tentang program-program mereka.

Dalam FGD tersebut, pemerintah Kabupaten Sampang telah menciptakan forum yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pendapat, saran, dan masukan terkait program E-government dan pembangunan Smart city. Dengan mendengarkan umpan balik tersebut, pemerintah dapat memahami lebih baik kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, umpan balik tersebut juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat

dalam merancang kebijakan publik. Melalui FGD, pemerintah Kabupaten Sampang juga dapat mengidentifikasi program-program yang paling relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan Smart city. Contohnya adalah program sekolah sampah yang telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dengan mendengarkan umpan balik tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi dan memperbaiki program-program yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pernyataan AH juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sampang sangat memperhatikan umpan balik masyarakat dalam merancang kebijakan dan program-programnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini penting dalam membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Smart city.

Secara keseluruhan, tanggapan AH menggarisbawahi pentingnya umpan balik masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan program-program E-government. Melalui FGD dan pendekatan partisipatif lainnya, pemerintah Kabupaten Sampang dapat menggali pandangan dan aspirasi masyarakat, menjadikannya dasar untuk merancang program-program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Sampang dapat membangun Smart city yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan.

Teori analisis SWOT dalam komunikasi pemerintah untuk mencapai Smart city melalui E-government melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi prospek keberhasilan dan hambatan yang mungkin muncul dalam pengembangan E-government untuk Smart city. Dengan

memperhatikan aspek-aspek ini, pemerintah dapat merancang strategi yang efektif untuk memaksimalkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dalam

mencapai tujuan Smart city yang inklusif dan berkelanjutan (Yusuf dkk, 2018). Pada sesi wawancara yang telah dilaksanakan, salah satu informan yakni Mahrus Zamroni, memberikan pendapat sebagai berikut :

“Pertama di samping struktur pemerintahan, juga ada potensi yang besar dari kelompok pemuda. Baik pemuda Muhammadiyah, pemuda Ansor, MPI. Karang Taruna, dan organisasi masyarakat lainnya”. (MZ, 50)

Dalam pernyataannya, informan MZ menyoroti potensi yang besar dari kelompok pemuda dalam mencapai tujuan Smart city melalui E-government. Beliau menyebutkan beberapa kelompok pemuda seperti pemuda Muhammadiyah, pemuda Ansor, MPI, Karang Taruna, dan organisasi masyarakat lainnya yang memiliki peran penting dalam menggerakkan kemajuan di Kabupaten Sampang. Potensi dari kelompok pemuda ini dapat menjadi kekuatan dalam mendukung pengembangan E-government untuk mencapai tujuan Smart city. Dengan keterlibatan dan kolaborasi dari kelompok pemuda dengan berbagai latar belakang dan organisasi, pemerintah dapat memanfaatkan

energi, kreativitas, dan semangat inovasi mereka untuk mempercepat implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik. Kelompok pemuda ini juga dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap layanan E-government.

Selain itu, kolaborasi dengan kelompok pemuda juga dapat memperluas jangkauan pemerintah dalam menyampaikan informasi dan mempromosikan layanan E- government. Dengan keterampilan digital yang dimiliki oleh kelompok pemuda, mereka dapat berperan penting dalam mendukung pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara menggunakan layanan E- government. Melalui kerjasama dengan kelompok pemuda, pemerintah dapat mencapai target audiens yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi pengguna aktif teknologi.

Dalam rangka mencapai tujuan Smart city, penting bagi pemerintah untuk melibatkan dan mendukung kelompok pemuda ini melalui program-program yang relevan. Ini

dapat dilakukan melalui kemitraan, pelatihan, dan pemberian kesempatan bagi kelompok pemuda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan implementasi program-program E- government. Dengan demikian, pemerintah dapat memperkuat keterlibatan pemuda dan mengoptimalkan potensi mereka dalam mencapai tujuan Smart city yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tanggapan MZ menyoroti pentingnya melibatkan kelompok pemuda dalam upaya mencapai tujuan Smart city melalui E-government. Potensi dan peran mereka sebagai agen perubahan dan inovator dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan publik. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan kelompok pemuda, Kabupaten Sampang dapat memanfaatkan potensi yang besar ini untuk mencapai tujuan Smart city yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Sampang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan Smart City melalui implementasi E- government dengan melibatkan masyarakat, meskipun masih ada tantangan dalam sosialisasi dan pemanfaatan teknologi. Faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya memainkan peran penting dalam keberhasilan

implementasi ini, dengan pendidikan mempengaruhi pemahaman, ekonomi mempengaruhi aksesibilitas, dan budaya lokal mempengaruhi partisipasi masyarakat. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan seperti komitmen pemerintah dan infrastruktur yang memadai, serta kelemahan dalam sosialisasi dan sumber daya manusia, dan ancaman keamanan siber serta resistensi masyarakat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui strategi yang mempertimbangkan konteks lokal dan melibatkan semua pihak, Kabupaten Sampang dapat mencapai visi Smart city yang inklusif dan berkelanjutan.

SARAN

Untuk mencapai visi Smart city yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sampang melalui E- government, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi masyarakat tentang E-government, melakukan evaluasi dan perbaikan aplikasi yang ada, serta memanfaatkan infrastruktur seperti akses internet gratis dengan konten yang relevan. Penting juga memperkuat kerja sama dengan masyarakat, meningkatkan literasi digital melalui pelatihan, untuk meningkatkan partisipasi dalam layanan E-government. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung tujuan Smart city yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basri, R. M. (2018, November 19). Pemkab Harus Maksimalkan Penerapan E-Government. <https://Radarmadura.Jawapos.Com/Sampang/74893815/Pemkab-Harus-Maksimalkan-Penerapan-Egovernment>
- Abdurrahman, D., & Prasetyo, T. F. (2018). ANALISIS DAN PERANCANGAN E-GOVERNMENT DALAM TRANSPARANSI SISTEM PEMERINTAHAN DESA.(Studi Kasus : Desa Tenjo Layar Dan Desa Tanjung Sari Majalengka). *J-Ensitem*, 5(01), 1–13. <https://doi.org/10.31949/J-Ensitem.V5i01.1212>
- Anggraini, S. P., & Suaidah, S. (2022). Sistem Informasi Sentra Pelayanan Publik Dan Administrasi Kependudukan Terpadu Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Berbasis Website. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 12–19
- Bahri, S., Effendy, K., Ngadisah, & Lukman, S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TANGERANG PAPTUNG: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 3(3), 61–75. <https://doi.org/10.54783/Japp.V3i3.316>
- Citiasiainc. (2023, August 2). Bimtek Tahap II Penyusunan Masterplan Smart City, Kabupaten Sampang Tuai Pujian Dari Perwakilan Ditjen Aptika RI. <https://Citiasiainc.Id/Bimtek-Tahap-Ii-Penyusunan-Masterplan-Smart-City-Kabupaten-Sampang-Tuai-Pujian-Dari-Perwakilan-Ditjen-Aptika-Ri/>
- Hasan, E. (2022). *Komunikasi Pemerintah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jiap.2016.002.04.15>
<https://journal.trunoyo.ac.id/Inicialegis/Article/Download/8822/4912>
- Lestari, Y. D., Nugraha, J. T., & Fauziah, N. M. (2021). Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengemban Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(2), 163-178.
- NADILA, S. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Newsroom, J. (2024, Februari 27). Bersama Kemenkominfo, Pemkab Sampang Optimalkan Penyelenggaraan SPBE dan Literasi Digital. Retrieved from kominfo.jatimprov.
- Nurlukman, A. D., & Basit, A. (2021). STRATEGI DAN IMPLEMENTASI DALAM TATA PEMERINTAHAN DENGAN BERBASIS PENGEMBANGAN. *Jurnal MODERAT*, 7(2), 270–280.
- Pratama, H. (2023, Jan 15). Luncurkan aplikasi pelayanan, warga Sampang tak perlu antri lama di RSUD, download di Play Store.:

- Smart City In Bandung 2018. E- Proceeding Of Management, 5(3), 3126–3130.
- Umam, K. (2024, Jan 13). Indeks SPBE Meningkatkan, Sampang Tertinggi se Madura. Retrieved from rri.co.id: https://www.rri.co.id/daerah/514_004/indeks-spbe-meningkat-sampang-tertinggi-se-madura
- Widiyaningrum, W. Y. (2023). Strategi Dinas Komunikasi Dan Informasi (Diskominfo) Dalam Pengembangan Dan Pembangunan Master Plan Smart City Di Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*,7(1),44–55.
- Widodo, N. (2016). Pengembangan E- Government Di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi Di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(4), 227–235.
- Yusuf, R. M. S., & Jumbuh, H. M. (2018). Penerapan E- Government Dalam Membangun Smart City Pada Kota Bandung Tahun 2018 E- Government Implementation In Building